

**ANALISIS ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: PENDEKATAN DATA PANEL
(Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)**

Abstract

This study aims to analyze the effect of zakat as Regional Own Source Revenue (PAD) on Human Development Index (HDI) in 12 districts in Aceh Province. The study used panel data from 2014 to 2016, with Simple Linear Regression analysis. The results showed that each increase in zakat income as a source of PAD by 1 percent will also increase the human development index (HDI) by 1,14. percent, assuming that other variables are constant. Therefore, we concludes that zakat as a source of PAD gives a positive influence for the improvement of human development index (HDI) in 12 districts in Aceh Province. Moreover, it is suggested to Baitul Mal as the institution of zakat distribution to increase the socialization of the benefit of zakat as the income of the region and improve the role of local government, local communities to monitor and ensure that zakat is given to communities according to the criteria of the recipient of zakat.

Cut Risya Varlitya

*Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala
E-mail: crvarlitya@gmail.com*

Keywords:

*Zakat, Human Development Index,
Regional Own Source Revenue*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan pilar utama majunya suatu negara yang dapat dilihat dari peran strategis sumber daya manusia. Oleh karena itu salah satu tujuan utama pengelolaan zakat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ialah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), dan perihal ini tidak terlepas dari mutu sumber daya manusia yang ada dinilai dengan menggunakan instrumen indeks pembangunan manusia (Beik, 2014). Sejalan dengan tren pembangunan, indeks pembangunan manusia saat ini dianggap sebagai salah satu prospek yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang tingkat pembangunan dan kesejahteraan manusia. (Nurzaman, 2010)

Pelaksanaan Zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimulai pada tahun 2001 berdasarkan pasal 4 (2) huruf c dalam UU No. 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam). Kemudian Pemerintahan Aceh menyebutkan pengelolaan zakat serta sebagainya tidak tunduk terhadap UU Pengelolaan Zakat karena mempunyai otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. karena pasal 180 (1) huruf d menyiratkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Aceh, selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal, serta lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pasal 191 menyiratkan bahwa zakat, harta wakaf serta harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh serta Baitul Mal kabupaten/kota. (Serambi Indonesia, 2016)

Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang paling penting saat penerapan sistem desentralisasi, dimana indikator utamanya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Namun tidak semua daerah mempunyai sumber PAD yang optimal, oleh karena itu daerah yang memiliki sumber PAD yang kecil, penerapan zakat sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Desentralisasi fiskal juga dapat memberdayakan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan mereka sendiri tanpa bergantung pada hibah pemerintah pusat. Di Amerika Latin, desentralisasi meningkatkan belanja pemerintah daerah dari 20 persen dari total belanja pemerintah pada tahun 1985 menjadi sekitar 30 persen di tahun 2010. Namun, jika pendapatan asli daerah tetap tidak berubah, sekitar 10 persen dari total nasional, akan membuat keuangan pemerintah daerah lebih rentan dan kurang dapat diprediksi, hal ini akan merusak perencanaan jangka panjang. Pemerintah daerah Indonesia saat ini mengelola hampir sepertiga dari total belanja publik dan sekitar setengah dari pengeluaran pembangunan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur. Oleh karena itu diharapkan

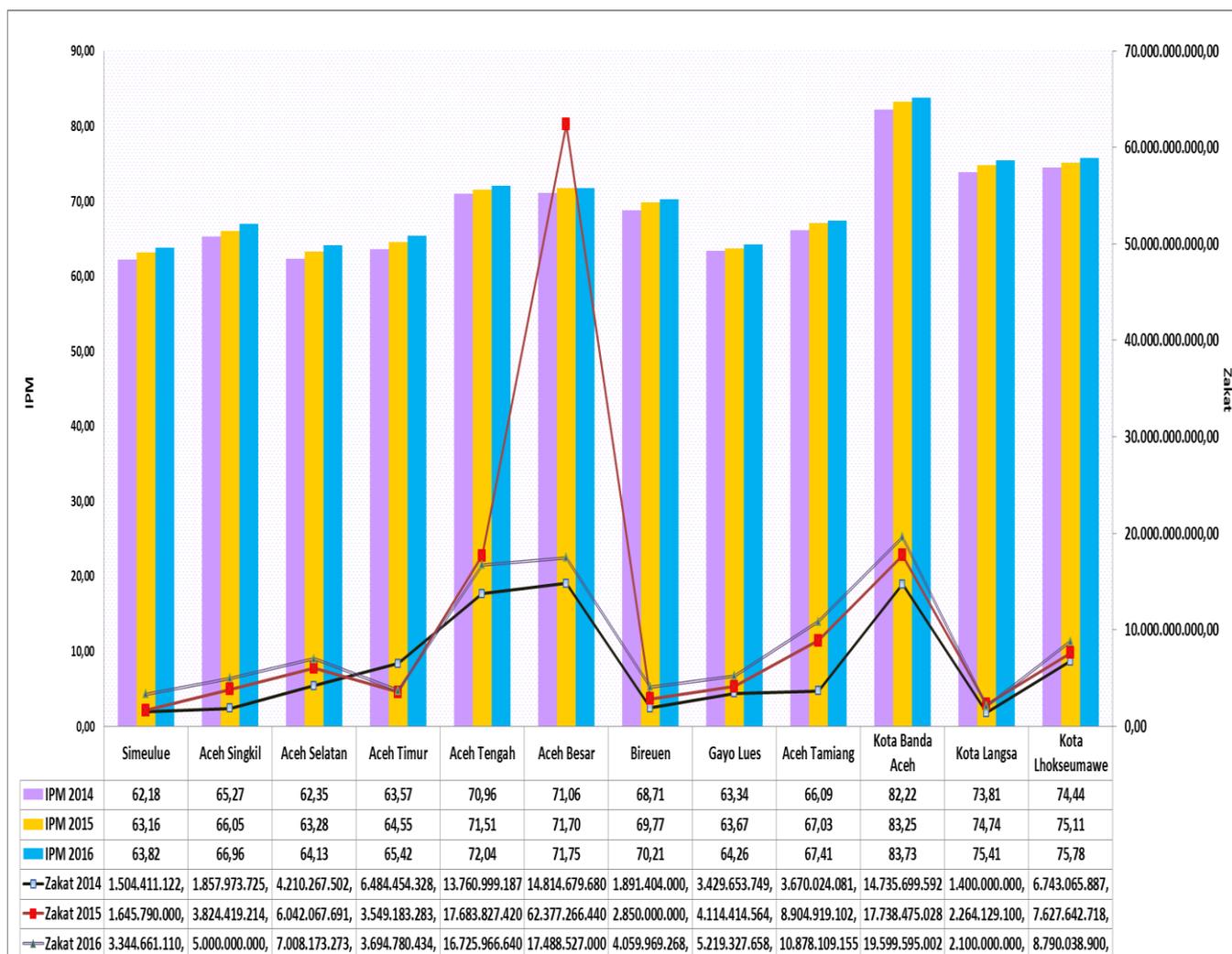
desentralisasi fiskal dapat berkontribusi besar pada pembangunan manusia di daerah yang paling miskin. (UNDP, 2016)

Penyaluran dana zakat, Infaq dan Sadaqah berdampak secara positif dan signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini dapat diperhatikan dari penyaluran dana zakat yang bertahap akan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, sehingga meningkatkan standar hidup masyarakat (Anggraini, 2016). Oleh karena itu penyaluran zakat akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan mutu sumber daya manusia yang diukur melewati Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut BPS (2016), kategori IPM yang digunakan untuk membedakan capaian antarwilayah yaitu dapat dikelompokkan menjadi beberapa katagori yaitu: kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan katagori rendah ($IPM < 60$).

Pada tahun 2015 Indonesia menduduki ranking ke 113 dari 188 negara didunia dimana menduduki kategori sedang untuk IPM, yaitu sebesar 68,9 yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 69,1 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,9 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 7,9 tahun dan Pengeluaran Perkapita (PPP) sebesar \$10.053, dibawah Negara Thailand yang menduduki rangking 87 dengan IPM sebesar 74,0 (AHH: 74,6 tahun, HLS: 13,6 tahun, RLS: 7,9 tahun dan PPP: \$14.519). IPM tertinggi diperoleh Negara Norwegia yaitu sebesar 94,9 (AHH: 81,7 tahun, HLS: 17,7 tahun, RLS: 12,7 tahun dan PPP: \$67.614) (UNDP, 2016).

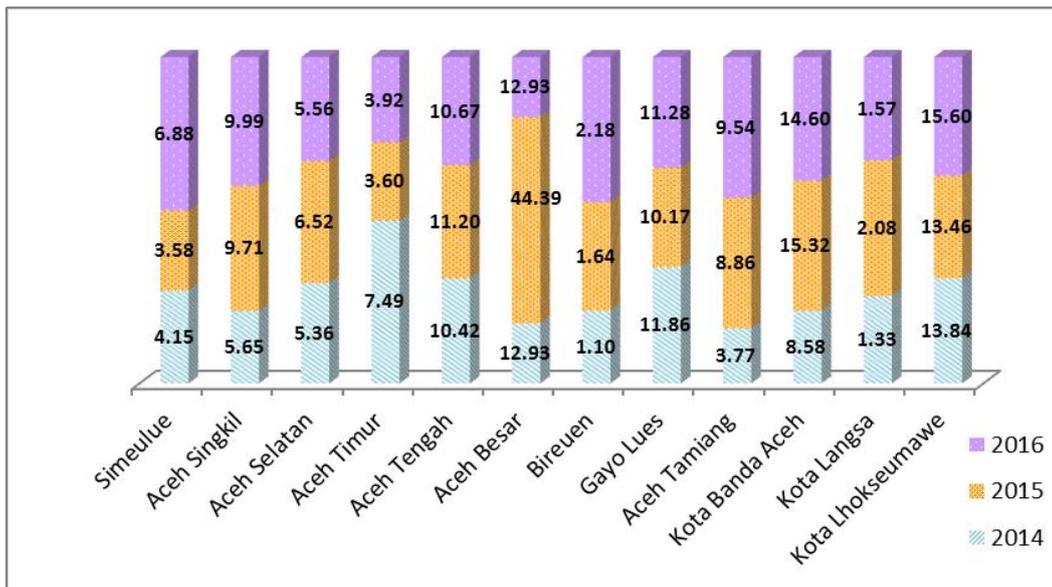
IPM Provinsi Aceh dari tahun 2010-2016 berada pada kategori sedang. Pada tahun 2016 IPM Aceh berstatus pembangunan sedang yaitu sebesar 70,00 (BPS, 2016). Pada gambar 1 dapat dilihat perbandingan pemasukan zakat sebagai PAD dan IPM itu sendiri. Pada Tahun 2016 Kota Banda Aceh berada pada kategori IPM sangat tinggi yaitu sebesar 83,73 dengan penerimaan zakat sebesar Rp19.599.595.002, sedangkan Simulue memperoleh kategori IPM sedang yaitu sebesar 63,82 (zakat: Rp3.344.661.110,69). Pada tahun 2015 Aceh Besar memperoleh zakat sebagai sumber PAD Rp62.377.266.440 (IPM: 71,70), berbeda halnya dengan Kota Langsa dengan perolehan zakat hanya sebesar Rp2.264.129.100, meskipun masih termasuk dalam katagori IPM tinggi yaitu sebesar 74,74 tetapi memperoleh angka IPM lebih besar dibandingkan Aceh Besar. Hal ini menjadi polemik dimana seharusnya penerimaan zakat yang besar sebagai sumber PAD dapat meningkatkan IPM pula. Tetapi, beberapa daerah menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana penerimaan zakat dan IPM menunjukkan hasil yang tidak searah.



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

Gambar 1
Perbandingan Zakat dan IPM Tahun 2014-2016

Kontribusi Zakat terhadap PAD sangat fluktuatif dari tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 ke 2016, dari 12 kabupaten kota, terdapat 6 kabupaten (Simuelue, Aceh Singkil, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang) dan 1 Kota Lhokseumawe yang kontribusi zakatnya semakin meningkat. Sedangkan sisanya mengalami penurunan kontribusi, walaupun terdapat beberapa kabupaten/kota yang pendapatan asli daerah yang bersumber dari zakat lebih tinggi dari daerah lain yaitu Aceh Besar, kota Banda Aceh, Aceh Tengah, dan lain-lain (gambar 2), sehingga dapat diperkirakan potensi zakat di Aceh sangat besar dan dapat mencapai mencapai Rp 1,3 triliun, namun manajemen dan upaya pengumpulan zakat di bumi syariat Islam belum dilaksanakan secara maksimal (Serambi Indonesia, 2015). Diharapkan zakat dapat mengganti mustahiq (penerima) menjadi muzakki (orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat) atau paling tidak dapat menciptakan kemandirian bagi masyarakat secara ekonomi. Dalam konteks Aceh, zakat juga berpotensi besar menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih tinggi (Serambi Indonesia, 2014).



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

Gambar 2
Kontribusi Zakat terhadap PAD 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai sumber PAD pada IPM di 12 Kabupaten/Kota di Aceh serta menyajikan perbandingan sejumlah indikator IPM. Bagian awal berupa penjelasan singkat zakat sebagai sumber PAD pada IPM, selanjutnya penulis memberikan paparan tentang tinjauan pustaka, kemudian dijelaskan perhitungan zakat terhadap IPM menggunakan data panel dan analisis regresi linier sederhana. Pada bab pembahasan secara kritis akan menilai perbandingan indikator IPM baik 12 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Indonesia serta menganalisis zakat sebagai sumber PAD pada IPM. Bagian terakhir penulis akan membahas kesimpulan hasil dan mengusulkan beberapa saran.

TINJAUAN TEORITIS

Zakat

Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat adalah suatu instrumen keagamaan dimana individu didalam masyarakat memberikan bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan. Meskipun instrumen ini sangat potensial untuk mendorong pengentasan kemiskinan, namun instrumen ini tidak dapat menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kemakmuran. Zakat juga tidak mengganti komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan bencana. Zakat ini dapat dialihkan ke komunitas yang lebih mampu dan diharapkan dapat memenuhi atau membantu sebagian kebutuhan hidup orang miskin terutama untuk kerabat dekat dan tetangga sekitar individu tersebut.

Zakat bukanlah aset bisnis, penerima zakat bukan pelanggan atau klien amil, dan hubungan antara amil dan penerima bukan juga hubungan bisnis. Peraturan zakat memberi kesempatan memanfaatkan zakat untuk tujuan produktif. Zakat untuk tujuan produktif lebih menguntungkan daripada konsumtif terutama untuk pemberdayaan. Namun sebagian besar institusi amil zakat memanfaatkan zakat untuk tujuan produktif berupa qard al hasan (pinjaman). Standar akuntansi zakat (SFAS 109) di Indonesia mengakui mekanisme pinjaman atau dana bergulir untuk infaq/sadaqah, namun ulama Islam cenderung tidak setuju dengan zakat (infaq/sadaqat) yang diterima oleh penerima sebagai pinjaman. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif dengan kesepakatan pinjaman (aqad). Namun sebagai jalan tengah baik bagi kepemilikan zakat maupun infaq/sadaqat untuk tujuan produktif dengan pertimbangan fiqh; terdapat dua mekanisme yaitu: mekanisme pertama, zakat atau infaq/sadaqat adalah untuk (dimiliki) amil sebagai sumber dana bagi penerimanya dan yang kedua, mekanisme dana tabungan untuk penerima. (Alim, 2015)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran penggabungan dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan, diterbitkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), didalam Laporan Pembangunan Manusia pertama pada tahun 1990. Ciri inovatif IPM ialah penciptaan satu statistik tunggal, sebagai kesimpulan ukuran perkembangan manusia, yang mampu menggambarkan perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan ukuran IPM, kemajuan suatu negara akan dinilai pada tingkat minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk bertahan dari waktu ke waktu. Pada sudut pandang teknis, IPM secara normal ditetapkan melalui nilai minimum dan maksimum untuk setiap dimensi, yang disebut *goalposts*, sehingga masing-masing negara akan ditandai dengan *goalposts* ini, yaitu dengan nilai antara 0 dan 1. Metode ini memungkinkan untuk mendapatkan peringkat negara, berdasarkan pencapaian pembangunan manusia. Sebelum 2010, IPM dihitung dengan menggabungkan tiga indikator: Indeks harapan hidup (*LEI/life expectancy index*), indeks pendidikan (*EI/educational index*) dan indeks pendapatan (*II/income index*) dengan rata-rata sederhana. Pada tahun 2010 didalam laporan Human Development, diperkenalkan metodologi baru melalui rata-rata perhitungan geometris dari tiga komponen yang sama.

Berbeda dengan IPM yang lama, IPM baru memperhitungkan perbedaan dalam pencapaian dimensi. Dengan cara ini, kinerja yang buruk dalam dimensi apa pun tercermin secara langsung dalam IPM baru, yang akan menarik seberapa bagus kinerja suatu negara melalui tiga dimensi IPM tersebut (Human Development Report, 2011). Perubahan metode agregasi menyebabkan dampak

yang moderat pada peringkat IPM. Hal ini diambil dari rata-rata geometric sehingga dapat menghasilkan nilai indeks yang lebih rendah untuk semua negara, karena rentang yang lebih tinggi dalam satu dimensi mengimbangi pencapaian yang lebih rendah. IPM disusun oleh tiga indeks: Harapan hidup saat lahir adalah ukuran yang dipilih untuk menggambarkan secara kuantitatif kualitas kehidupan manusia di setiap negara. Indeks pendidikan, yang diukur dengan rata-rata geometrik dua komponen: rata-rata tahun sekolah untuk orang dewasa yang berusia 25 tahun indeks (MYSI/*Mean Year Of Schooling Index*) dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah yang memasuki usia indeks (EYSI/*Expected years of schooling*). Indeks Penghasilan dimana Pendapatan Nasional Bruto per kapita mewakili komponen kekayaan indeks dengan purchasing power parity/PPP (paritas daya beli), yang menggantikan Produk Domestik Bruto yang lama (Maccari, 2014).

Hal ini diperkuat juga oleh R.P & G.A (2015) yang menulis bahwa Indeks Pembangunan Manusia dianalisis di tiga bidang utama, yaitu: 1) Indeks harapan hidup yang merupakan indikator utama harapan hidup rata-rata di dunia. Selain itu, indeks ini mengukur kesehatan dan umur panjang warga suatu negara. 2) Indeks pendidikan, yang mencakup akses terhadap pendidikan, yang diukur dengan rata-rata harapan hidup sekolah anak-anak usia sekolah dan rata-rata tahun sekolah pada populasi orang dewasa. 3) Indeks pendapatan nasional bruto, yang merupakan metode utama untuk menilai tingkat kehidupan (kualitas hidup), diukur dengan nilai pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dalam dolar AS.

Di bidang ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan sebagai penilaian kuantitatif dasar modal manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komprehensif, yang menjadi ciri tingkat perkembangan manusia di negara dan wilayah. Indeks ini melekat dalam pengukuran pencapaian negara dalam hal kesehatan dan umur panjang, pendidikan dan pendapatan aktual warganya (Mankiw, Romer, & Weil, 1992).

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memakai metode pooled data atau data panel adalah kombinasi dari data time series serta cross-section (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011). Penelitian dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama periode 2014-2016, perihal ini disebabkan oleh keterbatasan data zakat di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Untuk menganalisis zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, secara matematis dapat ditulis $Y = f(X_i)$ dimana $I = 1, 2, \dots, n$, dimana Y adalah dependent variable dan X adalah independent variabel, maka hubungan kedua variabel tersebut disebut regresi. Oleh karena itu digunakan regresi linier sederhana yang persamaannya dapat dituliskan: (Jamal, 1999)

$$\hat{Y} = bX + c$$

Dimana b adalah koefisien regresi dan c adalah konstanta.

Menurut Sumodiningrat (1993) pengujian regresi linier sederhana menggunakan persamaan

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + U_i$$

Diketahui:

- Y = Variabel terikat
- X = Variabel bebas
- α dan β = Parameter-parameter regresi
- U_i = Variabel gangguan stokastik

Kemudian dari formula diatas, variabel zakat ditransformasikan kedalam logaritma natural sehingga menjadi:

$$IPM = \alpha + \beta \text{LogZakat} + U_i$$

Dimana:

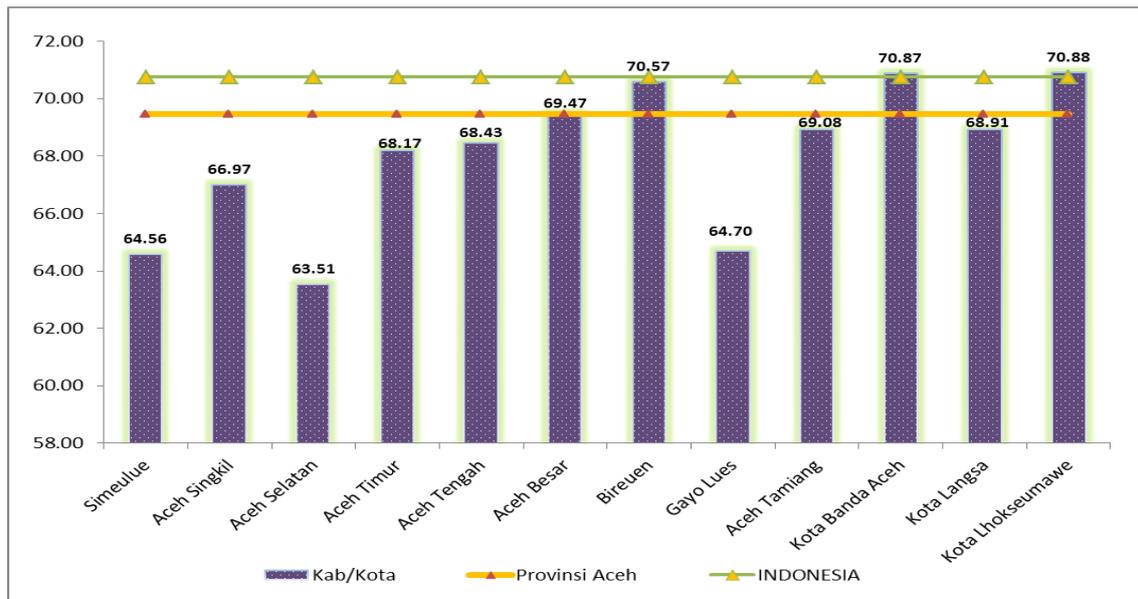
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- Log Zakat = Zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
- α = Konstanta
- U_i = Variabel Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Indikator dalam IPM

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan hidup adalah ukuran kesehatan suatu populasi, yang mencerminkan iklim, budaya, dan investasi publik dalam pencegahan, yang kesemuanya cenderung berubah perlahan dan memiliki efek jangka panjang. Dibandingkan dengan angka harapan hidup, angka kematian di bawah lima tahun merupakan salah satu indikator paling sensitif dari kesejahteraan manusia, kesehatan komparatif suatu negara, dan efektivitas kebijakan publik yang lebih tepat. (Hou, Walsh, & Zhang, 2014)



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

Gambar 3
Perbandingan Rata-Rata AHH 12 Kabupaten/Kota Dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016

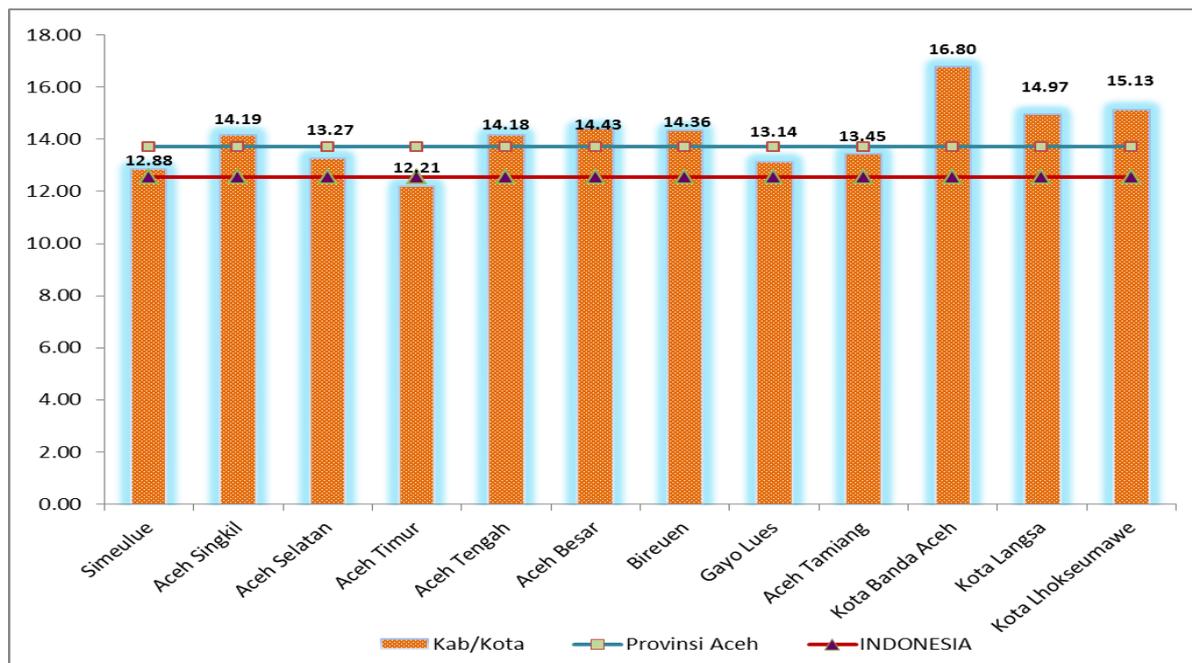
Dari gambar diatas menunjukkan bahwa rata-rata AHH selama tiga tahun yaitu 2014-2016, Kabupaten Aceh Selatan merupakan yang paling rendah tingkat AHHnya yaitu sebesar 63,51 tahun artinya bayi yang lahir di 3 tahun terakhir tersebut dapat hidup selama usia 63-64 tahun dan angka tersebut kurang dari rata-rata angka harapan hidup secara provinsi Aceh sebesar 69,45 tahun dan secara nasional sebanyak 70,76 tahun , hal ini disebabkan Aceh Selatan telah mempunyai fasilitas kesehatan satu rumah sakit tipe c yang didukung oleh 59 tenaga medis, 223 tenaga keperawatan, 154 tenaga bidan, 9 orang tenaga farmasi, dan 18 orang tenaga kesehatan lainnya, tetapi tidak disemua kecamatan posyandunya aktif. Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat didaerah tersebut adalah Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yaitu sebanyak 8.741 kasus (2016). sementara itu, walaupun jumlah kasus gizi buruk dan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) semakin menurun dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, namun masih ada bayi penderita gizi buruk ataupun BBLR sebanyak 15 bayi, jumlah kematian ibu akibat persalinan sebanyak 5 orang dan jumlah kematian bayi berumur 0-1 tahun sebanyak 44 orang, selain itu, terdapat pula jumlah penderita penyakit Tuberculosis (231 kasus) serta Malaria (2.069 kasus) (BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2017).

Rata-rata angka harapan hidup tertinggi dipegang oleh Kota Lhokseumawe diikuti Kota Banda Aceh bahkan melebihi rata-rata AHH secara nasional yaitu 70,88 tahun dan 70,87 tahun, hal ini bermakna bahwa kualitas hidup didaerah tersebut meningkat, pemenuhan makanan lebih baik, kesehatan terjaga, sehingga membuat bertambah lamanya hidup.

Berdasarkan analisis pengaruh zakat terhadap AHH menurut Murniati dan Beik (2013), komponen indeks angka harapan hidup merupakan indeks yang memberikan efek terendah pada nilai IPM mustahiq. Hal Ini disebabkan oleh indeks angka harapan hidup bukan komponen yang mempunyai kaitan langsung dengan distribusi zakat. Dana zakat yang disalurkan terhadap program ini lebih kepada pertolongan uang serta sembako yang berefek secara langsung terhadap indeks paritas daya beli.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Variabel harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan oleh anak terhadap usia tertentu di waktu yang akan datang. Diasumsikan bahwa kesempatan anak tersebut akan tetap bersekolah terhadap usia-usia selanjutnya setara dengan kesempatan penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk usia yang setara sekarang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas. HLS bisa dipakai untuk mengetahui keadaan pembangunan sistem pendidikan di beragam tingkatan yang dijelaskan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan bisa diraih oleh tiap-tiap anak (BPS, 2016).



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

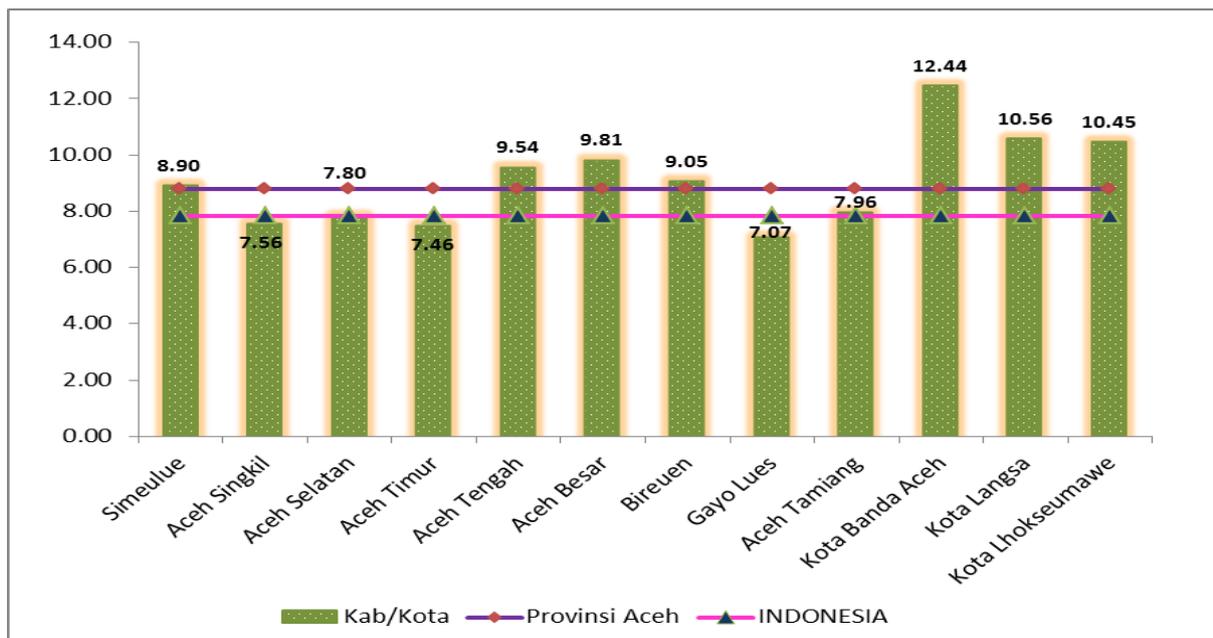
Gambar 4
Perbandingan Rata-Rata HLS di 12 Kabupaten/Kota
dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016

Rata-rata harapan lama sekolah yang terendah selama tiga tahun terakhir adalah Kabupaten Aceh Timur yaitu 12,21 tahun (setingkat tamat SMA). Sementara itu, rata-rata HLS Provinsi Aceh yang diperoleh cukup baik yaitu selama 13,71 tahun (tamam D-1) melebihi HLS secara nasional yang hanya 12,55 tahun. Sementara itu, Kota Banda Aceh mendapatkan rata-rata harapan lama sekolah

tertinggi diikuti Kota Lhokseumawe yaitu 16,80 tahun (setingkat tamat S-1) dan 15,13 tahun (tamat D-3 atau S-1 semester 6), nilai ini jauh melebihi rata-rata nasional.

Menurut Nurzaman (2010) di daerah penelitiannya, Indeks pendidikan memberikan kontribusi yang sangat positif dalam pembentukan nilai IPM mustahiq di mana mayoritas penerima zakat dan anggota keluarganya memiliki indeks pendidikan yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Hanya 4% yang memiliki nilai indeks pengetahuan rendah, hasil data mentah menunjukkan 100% penerima zakat telah melek huruf dan sebagian besar memiliki pendidikan di sekolah menengah atas.

Gambar 5 menunjukkan perbandingan rata-rata dari rata-rata lama sekolah di 12 Kab/Kota dan Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues merupakan peringkat yang terendah baik secara Provinsi Aceh (8,78 tahun) maupun Indonesia (7,84 tahun) yaitu sebesar 7,07 tahun atau hanya sempat menyelesaikan jenjang sekolah sampai kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Hal ini salah satunya disebabkan oleh akses pendidikan yang masih sulit dijangkau dan beberapa masih berada di tempat yang terisolir.

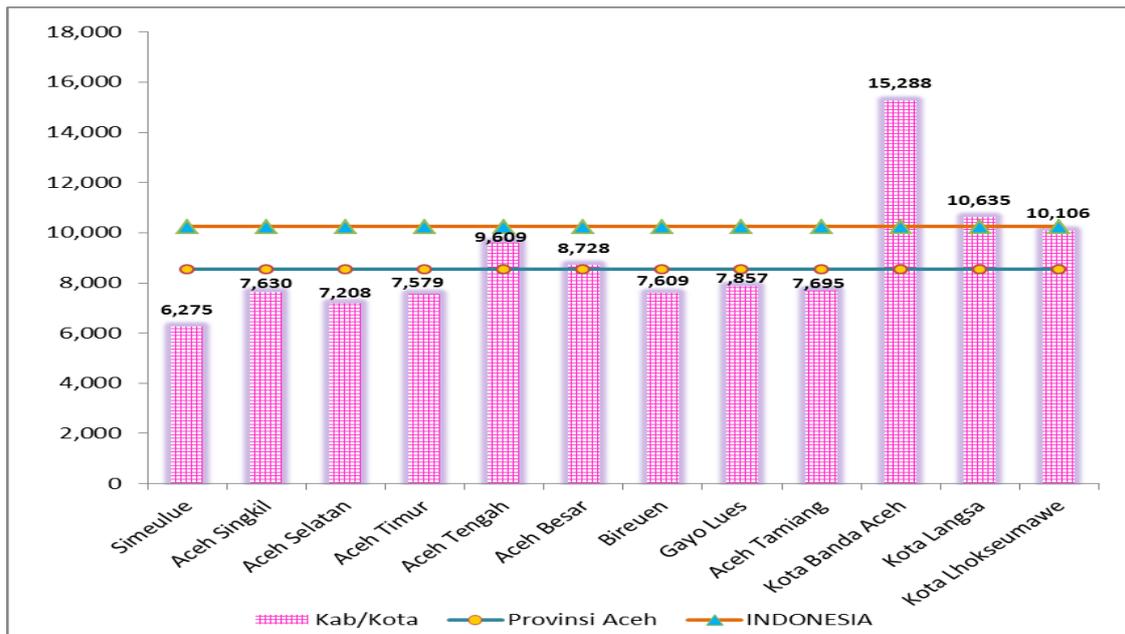


Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

Gambar 5
Perbandingan Rata-Rata dari RLS 12 Kabupaten/Kota
dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016

3. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan

Indeks pendapatan atau daya beli seseorang diukur dengan nilai kualitas standar hidup yang layak seorang individu akan dihitung secara langsung dengan menyesuaikan pengeluaran riil perkapita (Murniati & Beik, 2013).



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam angka 2017

Gambar 6
Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran di 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh Tahun 2014 s/d 2016

Gambar 6 menunjukkan rata-rata pengeluaran perkapita selama tahun 2014-2016 yang paling tinggi tetap diperoleh ibukota Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp15.288 juta melebihi nasional (Rp10.248 juta) dan Provinsi Aceh (Rp8.533 juta), diikuti oleh kota langsa (Rp10.635 juta) dan Kota Lhokseumawe (Rp10.106 juta). Rata-rata pengeluaran perkapita terendah kedua ada di Kabupaten Aceh Selatan (Rp7.208 juta) dan yang paling rendah adalah Kabupaten Simeulue (Rp6.275 juta). Penurunan daya beli menjadi penyebabnya karena pendapatan masyarakat di wilayah ini rendah, sehingga jika penghasilannya terbatas barang-barang yang mampu dibeli juga menjadi terbatas. Contohnya di Kabupaten Simeulue, pada tahun 2016 ada 11 persen penduduk yang bergerak dibidang pertanian, 3 persen sebagai nelayan, 6 persen sebagai wiraswasta, 1 persen sebagai buruh tani, 4 persen sebagai PNS, 1 persen karyawan honorer dan sisanya 74 persen penduduk yang belum/tidak bekerja/pelajar mahasiswa atau bergerak dibidang usaha lainnya.

Analisis Zakat Sebagai Sumber PAD terhadap IPM

Berdasarkan rujukan oleh Ajija, Sari, Setianto, serta Primanti (2011: 51) terdapat tiga cara yang bisa dipakai untuk menganalisis menggunakan data panel adalah:

1. Pooled least square (PLS) yaitu dapat mengestimasi data panel dengan cara OLS
2. Fixed effect (FE) yaitu menambahkan variable dummy terhadap data panel
3. Random effect (RE) yaitu memperhitungkan error dari data panel dengan cara *least square method*

Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow Test

Uji chow dilaksanakan untuk memilih model mana yang terbaik, menggunakan pendekatan model common effect atau model fixed effect. Hipotesis nol dari tes chow ialah:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Tabel 1
Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests Equation: PANEL_LOG Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	237.447674	(11,23)	0.0000
Cross-section Chi-square	170.680160	11	0.0000

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Apabila nilai prob chi-square $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak, yang maknanya model *fixed effect* yang lebih tepat dipakai dari pada model *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih antara menggunakan cara *fixed effect* (FE) atau cara *random effect* (RE). Hipotesis nol dari tes Hausman ialah:

H_0 : Random Effect

H_1 : Fixed Effect

(Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011)

Tabel 2
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: PANEL_LOG Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.351883	1	0.2449

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Apabila nilai prob chi-squarenya ialah $0,2449 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima, yang bermakna **metode random effect** yang lebih tepat dipakai daripada metode *fixed effect*.

Oleh karena hasil output yang didapatkan tidak konsisten maka dilakukanlah uji **LM test** (**Langrange Multiplier Test**), untuk menemukan metode mana yang lebih tepat dipakai apakah dengan metode *fixed effect* atau metode *random effect*. Hipotesis nol dari tes LM test ialah sebagai berikut:

H_0 : Common Effect

H_1 : Random Effect

Tabel 3
Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	33.37510 (0.0000)	1.592333 (0.2070)	34.96743 (0.0000)
Honda	5.777119 (0.0000)	-1.261877 --	3.192758 (0.0007)
King-Wu	5.777119 (0.0000)	-1.261877 --	1.105215 (0.1345)
Standardized Honda	6.332454 (0.0000)	-1.039424 --	0.811943 (0.2084)
Standardized King-Wu	6.332454 (0.0000)	-1.039424 --	-0.947945 --
Gourierioux, et al.*	--	--	33.37510 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Apabila dari hasil output nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) adalah $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak, yang artinya **metode yang sesuai digunakan adalah *random effect***.

Regresi Linier Sederhana Dengan Menggunakan Random Effect Model

Tabel 4
Regresi Linier Sederhana

Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/24/17 Time: 19:26
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 36
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43.88618	7.093209	6.187071	0.0000
LOGZAKAT	1.135545	0.307258	3.695743	0.0008
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			5.595200	0.9884
Idiosyncratic random			0.606540	0.0116
Weighted Statistics				
R-squared	0.284491	Mean dependent var	4.335636	
Adjusted R-squared	0.263446	S.D. dependent var	0.710384	
S.E. of regression	0.609671	Sum squared resid	12.63774	
F-statistic	13.51861	Durbin-Watson stat	1.315864	
Prob(F-statistic)	0.000809			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.128386	Mean dependent var	69.40944	
Sum squared resid	1075.775	Durbin-Watson stat	0.015458	

Sumber: Eviews 10 (diolah)

$$\text{IPM} = 43,88618 + 1,135545 \text{ LogZakat}$$

Hasil output diatas berarti koefisien regresi (β) sebesar 1,135545 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pendapatan zakat sebagai sumber PAD sebesar 1 persen juga akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,14 persen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Oleh karena itu zakat sebagai sumber PAD memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di 12 kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai program Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat kepada mustahiq, di bidang ekonomi yakni dengan program sektor produktif adalah pemberian pinjaman lunak (Qardhul Hasan) modal usaha tanpa bunga sehingga menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahiq untuk meningkatkan pendapatannya serta melepaskan pedagang mikro dari ketergantungan terhadap rentenir. Dibidang pendidikan Baitul Mal kabupaten/kota Provinsi Aceh memprogramkan bantuan beasiswa dan pelatihan life skill terhadap siswa dan mahasiswa maupun remaja yang putus sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Pada Tahun 2016, Baitul Mal kabupaten/kota Provinsi Aceh juga membuat program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang akan berefek menurunkan angka putus sekolah yang berpengaruh pada meningkatnya IPM dalam indikator Angka Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dalam sektor sosial diberikan bantuan fakir uzur tiap-tiap mustahiq memperoleh santunan perbulan (Baitul Mal Aceh, 2017). Namun tidak semua kabupaten/kota mempunyai program yang sama, hal ini tergantung dari potensi dana zakat yang dikumpulkan berbeda di tiap daerah.

Menurut (Musa, 2016) Baitul Mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat (yang sudah masuk dalam PAD), terutama dalam sistem pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. Bila hitungan zakat yang diterima lebih besar dari zakat yang direncanakan maka dana zakat yang lebih dari perencanaan tak bisa ditarik atau di keluarkan kembali. Demikian juga bila hitungan zakat yang diterima lebih sedikit dari yang direncanakan (sedangkan platform anggaran telah ditetapkan dalam DPA), maka pengeluaran terhadap pos zakat dalam DPA tersebut bukanlah semuanya dana zakat, melainkan dari sumber lain yang tak dikenal namun sah dipakai rujukan oleh aturan tatakelola keuangan negara. Apabila kesulitan ini telah diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan maka diharapkan pos zakat akan lebih maksimal didalam peningkatan IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Achasa (2016) menyebutkan bahwa akibat dari desentralisasi fiskal pada IPM ditinjau dari sisi rasio PAD menunjukkan efek yang positif serta signifikan kepada IPM di Indonesia yaitu jika PAD sebesar 0,106699, maknanya tiap adanya pertumbuhan PAD 1 persen akan menaikkan IPM sebesar 0,106699 persen dan sebaliknya. Diperkuat dari hasil yang didapatkan oleh Fadhil, Munawwarah, Balqis, Nadra, & Windatria (2015)

menyatakan bahwa pengaruh zakat sebagai PAD terhadap IPM di 4 wilayah Provinsi Aceh berpengaruh signifikan dan positif, maknanya apabila zakat meningkat, IPM juga akan meningkat. Hal ini terjadi akibat alokasi dana zakat melalui belanja langsung disalurkan melalui program yang menunjang pembangunan manusia.

Namun dengan menerapkan metode baru untuk memperkirakan nilai IPM pada tingkat individu dan keluarga. Rata-rata IPM mustahiq dari sampel yang diambil lebih rendah dari rata-rata tingkat IPM baik di Jakarta maupun di tingkat nasional. Ini dapat menyiratkan bahwa dampak zakat pada kesejahteraan mustahiq tidak begitu berpengaruh atau diperlukan beberapa waktu untuk melihat efektivitasnya. Sementara Zakat juga tidak secara langsung mempengaruhi nilai IPM, seharusnya pemberian zakat berdampak negatif terhadap pendapatan keluarga yang diperkirakan dari pengeluaran riil. Hal Ini berarti dana zakat digunakan untuk keperluan produktif dan bukan untuk keperluan konsumsi (Nurzaman, 2010). ZIS (zakat, infaq dan sadaqah) produktif berefek signifikan pada kesejahteraan mustahik yang bermakna bila dana ZIS yang diberikan dalam bentuk pertolongan modal berefek positif pada pertumbuhan kesejahteraan para mustahiq, yang bermakna bisa menaikkan pertumbuhan usaha mikro mustahiq yang ditunjukkan oleh naiknya volume penjualan serta keuntungan yang didapati (Jalaludin, 2012).

Pengujian Hipotesis

- Secara Parsial (Uji t)

Pengujian signifikansi efek variabel independen (zakat sebagai sumber PAD) secara parsial pada variabel dependen (IPM) adalah:

- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value}$ (nilai signifikansi) $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima (H_a ditolak).
- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value}$ (nilai signifikansi) $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H_a diterima (H_0 ditolak)

Maka, koefisien β (LogZakat) adalah sebesar $0,0008 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) artinya zakat berpengaruh secara signifikan terhadap IPM pada taraf 95 persen.

- Koefisien Determinasi

Nilai R-Squared sebesar 0,284491 memiliki pengertian bahwa sebesar 28 persen indeks pembangunan manusia di 12 kabupaten/kota dipengaruhi oleh zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 72 persen dipengaruhi oleh variable-variabel lain diluar zakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan manusia merupakan pilar utama majunya suatu negara yang dapat dilihat dari peran strategis sumber daya manusia. Oleh karena itu salah satu tujuan utama pengelolaan zakat ialah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), dan perihal ini tidak terlepas dari mutu sumber daya manusia yang ada diukur dengan menggunakan instrumen indeks pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat sebagai sumber PAD terhadap IPM di 12 Kabupaten/kota di Aceh serta menyajikan perbandingan sejumlah indikator IPM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan zakat sebagai sumber PAD sebesar 1 persen juga akan menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1,14 persen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Oleh karena itu zakat sebagai sumber PAD memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di 12 kabupaten/kota Provinsi Aceh, namun zakat yang produktif akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak kepada IPM dari pada zakat konsumtif.

Perbandingan sejumlah indikator di setiap Provinsi menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi memiliki pemasukan zakat dan Indeks pembangunan manusia yang lebih besar dari kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, Kabupaten Aceh Selatan memperoleh rata-rata angka harapan hidup paling rendah yaitu sebesar 63,51 tahun artinya bayi yang lahir di 3 tahun terakhir tersebut dapat hidup selama usia 63-64 tahun.

Rata-rata harapan lama sekolah yang terendah selama periode 2014-2016 dipegang oleh Kabupaten Aceh Timur yaitu 12,21 tahun (setingkat tamat SMA), dan rata-rata RLS yang terendah baik secara Provinsi Aceh (8,78 tahun) maupun Indonesia (7,84 tahun) berada di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebesar 7,07 tahun atau hanya menyelesaikan jenjang sekolah sampai kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Hal ini salah satunya disebabkan oleh akses pendidikan yang masih sulit dijangkau.

Kabupaten Simeulue merupakan kabupaten dengan rata-rata pengeluaran perkapita terendah yaitu sebesar Rp6.275 juta. Penurunan daya beli menjadi penyebabnya karena pendapatan masyarakat di daerah ini rendah, hal ini diakibatkan oleh kurangnya lapangan usaha sehingga jika penghasilannya terbatas barang-barang yang mampu dibeli juga terbatas.

Oleh karena itu, peningkatan penerimaan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia baik dari segi kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika dilihat dari potensi penerimaan zakat yang begitu besar

sehingga beberapa daerah yang tidak memiliki sumber PAD yang besar dapat menggunakan zakat sebagai penopang PAD.

Saran

1. Disarankan kepada Baitul Mal sebagai lembaga penyaluran zakat untuk meningkatkan sosialisasi manfaat penerimaan zakat sebagai pendapatan Asli Daerah dengan bahasa yang gampang dipahami oleh masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.
2. Baitul Mal sebagai Lembaga zakat juga diharapkan Lebih aktif dalam mempromosikan program-program pemberdayaan zakat melalui media informasi, agar para mustahiq memahami kriteria lolos sebagai penerima zakat.
3. Diharapkan peranan Pemerintah daerah, lembaga zakat maupun kalangan masyarakat lokal untuk dapat memantau dan memastikan penyaluran zakat tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak dan sesuai dengan kriteria penerima zakat.
4. Mengoptimalkan penjemputan zakat kepada para muzakki dengan jasa mobil keliling untuk pengutipan/pengumpulan zakat di daerah yang terdapat kegiatan perekonomian. Jasa mobil keliling pengumpulan zakat akan sangat bermanfaat kepada Muzakki yang tidak sempat datang ke kantor Baitul Mal.
5. Memperluas keterampilan dan profesionalitas karyawan Baitul Mal dalam memberikan pelayanan menangani masalah yang dialami oleh Mustahiq.
6. Diharapkan juga Pemerintah Kabupaten/Kota membuat mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memantau hasil zakat sebagai sumber PAD terhadap pembangunan manusia .

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015*, (hal. 232-236). Bali, Indonesia: Elsevier.
- Anggraini, R. (2016). *Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Baitul Mal Aceh. (2017, Juni 16). *Program Unggulan Baitul Mal Aceh yang Menyejahterakan*. Dipetik 2017, dari <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2831>

- Beik, I. S. (2014, Maret 25). *Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Dipetik 2017, dari Badan Amil Zakat Nasional: <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/pengaruh-zakat-terhadap-indeks-pembangunan-manusia/>
- BPS. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Jaya 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya.
- BPS. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2016*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- BPS Aceh Selatan. (2017). *Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan
- BPS Provinsi Aceh. (2017). *Provinsi Aceh Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Fadhil, M. F., Munawwarah, F., Balqis, P., Nadra, R., & Windatria. (2015). *Pengaruh zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin (studi Kasus: Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Aceh Besar, dan kab. Pidie)*. Dipetik 2017, dari <https://www.scribd.com/document/359706780/Pengaruh-Zakat-Sebagai-Pendapatan-Asli-Daerah-Terhadap-Indeks-Pembangunan-Manusia-Dan-Jumlah-Penduduk-Miskin>.
- Hayati, J., & Achasa, A. (2016). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Di Indonesia. *jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/530/426*, 199-214.
- Hou, J., Walsh, P. P., & Zhang, J. (2014). The dynamics of Human Development Index. *The Social Science Journal*, 1-17.
- Jalaludin. (2012, Desember). Pengaruh Zakat Infaq Dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik. *Majalah Ekonomi Tahun XXII*(No. 3), 270-277.
- Jamal, A. (1999). *Pengantar Statistika untuk Ekonomi dan Sosial*. Lhokseumawe: Fakultas Ekonomi Universitas Malikulsaleh.
- Maccari, N. (2014). *Sustainable Human Development: Human Development Index and The Environment*. *International Journal of Sustainable Human Development*, 2(1) , 29-34.
- Mankiw, G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992, May). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107(No.2), 407-437.
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2013). Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 2, 135-149.

- Nurzaman, M. S. (2010). Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance* (hal. 1-26). Qatar: Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation .
- R.P., Y., & G.A., B. (2015). Correlation Analysis Of The Components Of The Human Development Index Across Countries. *Procedia Economics and Finance*, 24, 766-771.
- Serambi Indonesia. (2014 , Maret 10). *Pro-Kontra Zakat Jadi PAD*. Dipetik 2017, dari Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2014/03/10/pro-kontra-zakat-jadi-pad?page=2>.
- Serambi Indonesia. (2015, Oktober 16). *Potensi Zakat Aceh Capai Rp 1,3 Triliun*. Dipetik 2017, dari Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/16/potensi-zakat-aceh-capai-rp-13-triliun>
- Serambi Indonesia. (2016, April 7). *Zakat, Pajak dan PAD*. Dipetik 2017, dari Serambi Indonesia: <http://aceh.tribunnews.com/2016/04/07/zakat-pajak-dan-pad>
- Sumodiningrat, G. (1993). *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- UNDP. (2016). *Human Development Report 2016*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2010). *Human Development Report 2010 - 20th Anniversary Edition*. The Real Wealth of Nations Pathways to Human Development'.
- UNDP. (2011). *Human Development Report 2011*. Sustainability and Equity: A Better Future for All.